

# Penerapan Petunjuk Teknis Operasional ( PTO ) Pada Kegiatan Tridaya LKM Bakti Mandiri Samarinda

Fittono<sup>1</sup>, Titin Ruliana<sup>2</sup>, dan Suyatin<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

E-mail: Ifiئتobing@yahoo.co.id

## ABSTRACT

LKM Bakti Mandiri is an institution led collegial collective, autonomous, independent, initiated and formed directly by the residents in the village Handil Bakti, with the aim to empower the community, under the auspices of the PNPM Mandiri. Each MFI pelaksanaan Tridayanya Bakti Mandiri activities set forth in the Technical Operational Guidelines, the National Program for Community Empowerment (PNPM), as contained in the circular issued by the Ministry of Interior, represented by the Director General of Community No. 414.2 / 3717 / PMD in 2008.

Formulation of the problem in this study is "What Tridaya activities LKM Bakti Mandiri has been run in accordance with the operational standards and technical guidelines that apply? ". The hypothesis in this study is "alleged that the Tridaya activities of LKM Bakti Mandiri has not been in accordance with the operational standards and technical guidelines that apply", where the percentage of responses comparison of measurement results is calculated by dividing the number of answers to the criteria of "good" answer to the whole number.

The results showed that the implementation of the tridaya activities of LKM Bakti Mandiri is still not going well, meaning tridaya activities of LKM Bakti Mandiri not in accordance with the operational standards and technical guidelines that apply. This is evident from the calculation of 49 (forty nine) answer "Fine" All the answers were divided by 68 (sixty eight) obtained the percentage of 72.06%.

Based on the above calculation and obtained findings showed that the hypothesis is accepted.

**Keywords:** Internal Control, PNPM

## PENDAHULUAN

Upaya peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, maka pada tahun 2007 oleh pemerintah diluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Melalui program ini dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan *partisipatif*, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh - kembangkan. Sehingga masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai obyek, melainkan juga sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

LKM ( Lembaga Keswadayaan Masyarakat ) Bakti Mandiri merupakan lembaga yang dipimpin secara kolektif kolegal, bersifat

otonom, independen yang diprakarsai dan dibentuk langsung oleh warga masyarakat di kelurahan Handil Bakti Palaran, dengan tujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, dibawah naungan PNPM Mandiri. LKM Bakti Mandiri dibentuk pada tahun 2010, melalui kegiatan Tridayanya yang meliputi kegiatan sosial, lingkungan, dan ekonomi diharapkan tujuan – tujuan PNPM dapat tercapai. Tercapai tidaknya tujuan PNPM dapat dinilai dari kegiatan yang tengah maupun sudah dijalankan. Dalam menjalankan kegiatannya LKM Bakti Mandiri memperoleh sumber dana yang berasal dari APBN, APBD, Swadaya Masyarakat, dan Partisipasi Dunia Usaha. Setiap pelaksanaan kegiatan Tridayanya LKM Bakti Mandiri diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana tercantum pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan

Masyarakat Nomor 414.2/3717/PMD tahun 2008, bahwa “ Untuk meningkatkan efektivitas kinerja, maka Petunjuk Teknis Operasional ( PTO ) agar menjadi acuan dalam pelaksanaan teknis operasional program yang berisi tentang kebijakan program, peran para pelaku, proses kegiatan, dan pengendalian pelaksanaan “. Dengan adanya pedoman teknis ini diharapkan pelaksanaan pengelolaan kegiatan yang dijalankan akan memenuhi standar yang berlaku umum, dimana kegiatan Tridaya dapat terorganisir sedemikian rupa sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan dan merealisasikan visi dan misi lembaga. Sedangkan pada pelaksanaan kegiatan tridaya LKM Bakti Mandiri yang meliputi kegiatan lingkungan, sosial, dan ekonomi diketahui masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis operasional yang berlaku. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih adanya ketidakpatuhan Unit Pengelola ( UP ) terhadap prinsip dan prosedur yang tertuang didalam Petunjuk Teknis Operasional PNPM dalam melaksanakan kegiatannya yaitu antara lain, tidak dibuatnya laporan dua mingguan oleh KSM, dalam pembuatan laporan akhir kegiatan hanya berdasarkan rangkuman pengeluaran dana tanpa adanya penelitian rinci terhadap realisasi di lapangan, ketidakpatuhan terhadap ketentuan mekanisme pengelolaan dana bergulir. Dimana hal- hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan seperti kredit macet, ketidaksesuaian anggaran terhadap realisasinya, manipulasi data dan sebagainya.

## DASAR TEORI

Menurut COSO ( *Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* ) yang dikutip oleh Tunggal (2013:24) mendefinisikan pengendalian internal adalah sebagai “ *A process, effected by an entity’s board of directors, management and other personel, designed to provide reasonable assurance reganling the achievement of objectives in the following categories* “.

Menurut PNPM pengendalian internal disini adalah rencana, metoda, prosedur dan kebijakan yang didesain oleh manajemen program untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, baik terkait dengan kehandalan pengelolaan dan pelaporan keuangan maupun ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan atau kebijakan.

Menurut PNPM tujuan sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga setiap proses PNPM selalu sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan PNPM.
- b. Menjaga bahwa hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar.
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- d. Mengendalikan pemanfaatan dana PNPM agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
- e. Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- f. Mengendalikan agar setiap pelaku PNPM dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Menurut Akmal (2006:25) unsur – unsur pengendalian internal adalah sebagai berikut :

- a. Lingkungan Pengendalian  
Merupakan tindak, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan perilaku manajemen puncak, direksi, dan pemilik entintas atas pengendalian dan kepentingannya.
- b. Penaksiran Risiko oleh Manajemen  
Merupakan identifikasi dan analisis yang dilakukan manajemen atas resiko – resiko yang relevan dengan penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- c. Aktivitas Pengendalian

Merupakan kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan.

- d. Sistem Informasi dan Komunikasi  
Merupakan metode – metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, menyusun, mengklasifikasikan,

PNPM menurut Departemen Pekerjaan Umum (2007:11) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat perkotaan.

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan

Tujuan PNPM adalah Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

### METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis data hasil penelitian digunakan alat analisis metode komparatif menggunakan Petunjuk Teknis Operasional PNPM ( Lampiran 1 ). Penelitian ini dirancang dengan membandingkan kenyataan yang ada di lapangan yaitu pada pengendalian internal yang dilaksanakan LKM Bakti Mandiri dengan prinsip dan prosedur yang tertuang pada petunjuk teknis operasional PNPM ( berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Nomor 414.2/3717/PMD tahun 2008 sebagaimana terlampir ) yang isinya berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran.

Hasil pengukuran terhadap parameter tersebut dihitung melalui perhitungan menurut Sudjana (2001:129) sebagai berikut :

$$Persentase = \frac{Jawaban\ baik}{Jumlah\ Seluruh\ Jawaban} \times 100\%$$

Sehingga berdasarkan hasil persentase tersebut diatas , baik tidaknya pengendalian internal pada LKM Bakti Mandiri akan terlihat berdasarkan kategori persentase menurut Arikuntoro (2006:246) sebagai berikut :

- 76 % - 100 % = Baik
- 56 % - 75 % = Cukup baik
- 40 % - 55 % = Kurang baik
- Di bawah 40 % = Tidak baik

### PEMBAHASAN

Tabel 5.1 Hasil Cecklist Observasi

Nomor Aturan PTO	Kategori Persentase				Total
	Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	
Ekonomi	20	1	2	1	24
Sosial	15	5	1	-	21
Lingkungan	14	7	2	-	23
<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>68</b>

Sumber : Hasil Penelitian, 2014

Berdasarkan hasil perbandingan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan Tridaya LKM Bakti Mandiri terhadap Petunjuk Teknis Operasional ( PTO ) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, diperoleh hasil jawaban dengan kriteria “ Baik “ sebanyak 49 ( empat puluh sembilan ) dari seluruh hasil jawaban perbandingan yang ada yaitu sebanyak 68 ( enam puluh delapan ). Sehingga dari hasil jawaban tersebut dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jawaban Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Jawaban}} \times 100\% \\
 &= \frac{49}{68} \times 100\% \\
 &= 72,06\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas menunjukkan bahwa LKM Bakti Mandiri dalam pelaksanaan kegiatannya belum sesuai dengan petunjuk teknis operasional ( PTO ) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Artinya kegiatan Tridaya LKM Bakti Mandiri masih belum berjalan dengan baik, dan masih terdapat kelemahan – kelemahan yang memungkinkan terjadinya tindakan penyimpangan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Terdapat kelemahan dalam analisis pinjaman berdasarkan 5 C yaitu:
  - *Character* ( watak calon pinjam ) : yaitu dengan tidak meminta informasi kepada tetangga dan aparat kelurahan setempat, karena dengan melihat *character* peminjam dapat diperoleh gambaran umum tentang kemauan atau itikad baik dari peminjam untuk mengembalikan pinjaman sesuai yang diperjanjikan.
  - *Condition* ( Kondisi Calon Peminjam ) : Tidak dilakukan penilaian apakah usaha calon peminjam baru akan berdiri, atau sudah berjalan. Bertentangan dengan UU, adat istiadat agama dan kesusilaan atau tidak merusak lingkungan. Pesaingnya cukup kuat tau tidak. Kemungkinan kedepannya mampu bersaing atau tidak. Dengan demikian bisa dilihat kemungkinan kelanjutan usaha tersebut.
  - *Capacity* ( Kemampuan Usaha Dalam Mencari Laba )  
Bagaiman Penjualannya, berapa harga pokoknya, berapa laba atau keuntungan yang diperoleh dalam siklus usaha, berapa biaya hidup keluarga, berapa keuntungan bersih, berapa % rencana peningkatan. Dari analisis *Capacity* diperoleh gambaran berapa kemampuan peminjam untuk mengembalikan pinjamannya.
  - *Capital* :  
Berapa modal yang dimiliki, berapa hutang yang ditanggung, berapa modal bersih yang ada dalam usaha.
  - *dan collateral* ( Barang apa yang yang dijadikan agunan pinjaman )

berapa nilai jual barang tersebut ?, mudah dijual atau tidak, apa bukti kepemilikannya. “ untuk PNPM mandiri aguna hanya berupa tabungan tanggung renteng sedangkan agunan lainnya tidak diperkenankan “.

Dimana hal – hal yang tersebut diatas bila tidak dilaksanakan dengan baik maka memungkinkan untuk timbulnya kredit macet.

- b. Terdapat kelemahan pada pemeriksaan kelayakan KSM sebagai sasaran PNPM dan sebagai calon peminjam, sebab dilapangan ditemukan adanya beberapa anggota KSM yang tergolong bukan rumah tangga miskin (orang mampu) yang menyiratkan bahwa tidak tercapai sepenuhnya sasaran PNPM khususnya pada kegiatan Ekonomi.
- c. Tidak dilakukannya pembinaan oleh petugas UPK kepada peminjam, yang terdiri dari kunjungan ketempat usaha, maupun kerumah peminjam, sehingga memungkinkan tidak terkontrolnya keberlangsungan kegiatan usaha yang dijalankannya maupun keberadaan sipeminjam. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya hal – hal yang tidak dikehendaki. Hal ini menunjukkan pula bahwa meskipun anggaran pinjaman bergulir terealisasi sepenuhnya, hal tersebut tidak menjamin bahwasanya LKM akan sepenuhnya pula mendapatkan pendapatan akan jasa yang diberikannya. Sebab tanpa dilakukannya penilaian tersebut tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan adanya kredit macet.
- d. Rendahnya pengendalian terhadap analisis terhadap usaha anggota sehingga memungkinkan manipulasi data oleh peminjam, dimana hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet.
- e. Tidak adanya pengukuran secara jelas terhadap tingkat pemahaman UPS mengenai prinsip pengelolaan kegiatan yang akan dijalankan. Sehingga memungkinkan terjadinya ketidaktepatan kegiatan dengan target PNPM.

- f. Pada LKM Bakti Mandiri ditemukan bahwa tidak adanya KSM yang ditolak, artinya semua KSM dinyatakan layak. Hal ini terjadi karena sebelum adanya pelaksanaan kegiatan diadakan penawaran terhadap calon KSM mengenai berkenan tidaknya untuk mekasnakan kegiatan tersebut, apabila tidak berkenan, maka akan diserahkan ke pihak lain.
- g. Tidak dilakukannya klarifikasi ke lapangan terhadap penerima manfaat kegiatan pendidikan, sehingga memungkinkan tidak tercapainya sasaran kegiatan sosial, baik dari segi kriteria penerima maupun dari segi keberlanjutan kegiatan.
- h. Untuk beberapa rencana pelaksanaan kegiatan akan kebutuhan tenaga kerja serta upah, dan hari kerja tidak dilakukan pengumuman kepada masyarakat, sebab diduga diantara pihak – pihak yang mengajukan RAB memanfaatkan kesempatan kerja yang diberikan, sehingga pihak – pihak mereka tersebutlah yang mengerjakannya, dimana mereka menganggap kegiatan tersebut sebagai proyek.
- i. Rendahnya pengawasan dalam kegiatan pengadaan bahan dan alat senilai kurang dari 15 juta rupiah, dimana survey harga yang dilakukan tidak dilakukan secara transparansi oleh KSM, sebab diduga terdapat permainan harga dibaliknya.
- j. Dari tahap dokumentasi dari empat kriteria foto yang harus ditampilkan terdapat beberapa kriteria yang tidak ditampilkan , yaitu foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan prasarana ( meskipun didalam laporan realisasi anggaran diketahui adanya peran serta perempuan di dalam pelaksanaannya), dan foto yang memperlihatkan pembayaran insentif secara langsung kepada masyarakat.
- k. Diketahui bahwa pemeriksaan realisasi kegiatan dan biaya ( RKB ) tidak sepenuhnya dibuat sesuai dengan kondisi terlaksana dilapangan , dan menunjukkan target akhir dari pelaksanaan. Sebab diketahui pembuatan

laporan yang hanya berdasarkan rekapitulasi bukti – bukti transaksi yang terjadi saja.

Dari temuan – temuan diatas dapat disimpulkan bahwa LKM Bakti Mandiri dalam menjalankan kegiatannya belum sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis operasional PNPM. Banyaknya prosedur kegiatan dari petunjuk teknis yang tidak terpenuhi tentunya akan mempengaruhi tercapainya sasaran dan tujuan LKM pada khususnya dan PNPM pada umumnya.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, penulis menarik kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan “ diterima “ . Sebab diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan tridaya LKM Bakti Mandiri masih belum berjalan dengan baik, artinya tidak sepenuhnya kegiatan yang dijalankan LKM Bakti Mandiri sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Hal ini terbukti dengan besarnya nilai persentase hasil perhitungan jawaban perbandingan sebesar 72,06 %, adapun ditemukan kelemahan – kelemahan yang memerlukan perbaikan diantaranya sebagai berikut :

- a. Terdapat kelemahan dalam analisis pinjaman berdasarkan 5 C ( *character, condition, capacity, capital dan collateral* ) yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut :
  - 1) *Character* : tidak dilakukannya pencarian informasi tentang watak dan karakter calon peminjam kepada tetangga dan aparat kelurahan setempat.
  - 2) *Condition* : melihat kondisi usaha calon peminjam tentang kemungkinan kelanjutan usaha tersebut.
  - 3) *Capacity* : melihat kemampuan usaha dalam memperoleh laba dalam siklus usaha yang dijalankan.
  - 4) *Capital* : melihat berapa modal, hutang yang ditanggung, dan berapa modal bersih yang ada dalam usaha.

5) *Collateral* : menilai barang apa saja yang dijadikan agunan pinjaman.

Dimana hal – hal yang tersebut diatas memungkinkan timbulnya kredit macet.

- b. Terdapat kelemahan pada pemeriksaan kelayakan KSM sebagai sasaran PNPM dan sebagai calon peminjam, sebab dilapangan ditemukan adanya beberapa anggota KSM yang tergolong bukan rumah tangga miskin (orang mampu) yang menyiratkan bahwa tidak tercapai sepenuhnya sasaran PNPM khususnya pada kegiatan Ekonomi. Sebagaimana yang tercantum pada pedoman teknis kegiatan tridaya menyebutkan bahwa sasaran utama kegiatan ekonomi ( pinjaman bergulir ) adalah rumah tangga miskin ( berpendapatan rendah ) diwilayah kelurahan/ desa LKM / UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin PS2.
- c. Tidak dilakukannya pembinaan oleh petugas UPK kepada peminjam, yang terdiri dari kunjungan ketempat usaha, maupun kerumah peminjam, sehingga memungkinkan tidak terkontrolnya keberlangsungan kegiatan usaha yang dijalankannya maupun keberadaan sipeminjam. Kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya hal – hal yang tidak dikehendaki. Hal ini menunjukkan pula bahwa meskipun anggaran pinjaman bergulir terealisasi sepenuhnya, hal tersebut tidak menjamin bahwasanya LKM akan sepenuhnya pula mendapatkan pendapatan akan jasa yang diberikannya. Sebab tanpa dilakukannya penilaian tersebut tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan adanya kredit macet.
- d. Rendahnya pengendalian terhadap analisis terhadap usaha anggota sehingga memungkinkan manipulasi data oleh peminjam, dimana hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet.
- e. Tidak adanya pengukuran secara jelas terhadap tingkat pemahaman UPS mengenai prinsip pengelolaan kegiatan yang akan dijalankan. Sehingga memungkinkan

terjadinya ketidaktepatan kegiatan dengan target PNPM.

- f. Pada LKM Bakti Mandiri ditemukan bahwa tidak adanya KSM yang ditolak, artinya semua KSM dinyatakan layak. Hal ini terjadi karena sebelum adanya pelaksanaan kegiatan diadakan penawaran terhadap calon KSM mengenai berkenan tidaknya untuk mekasnakan kegiatan tersebut, apabila tidak berkenan, maka akan diserahkan ke pihak lain.
- g. Tidak dilakukannya klarifikasi ke lapangan terhadap penerima manfaat kegiatan pendidikan, sehingga memungkinkan tidak tercapainya sasaran kegiatan sosial, baik dari segi kriteria penerima maupun dari segi keberlanjutan kegiatan.
- h. Untuk beberapa rencana pelaksanaan kegiatan akan kebutuhan tenaga kerja serta upah, dan hari kerja tidak dilakukan pengumuman kepada masyarakat, sebab diduga diantara pihak – pihak yang mengajukan RAB memanfaatkan kesempatan kerja yang diberikan, sehingga pihak – pihak mereka tersebutlah yang mengerjakannya, dimana mereka menganggap kegiatan tersebut sebagai proyek.
- i. Rendahnya pengawasan dalam kegiatan pengadaan bahan dan alat senilai kurang dari 15 juta rupiah, dimana survey harga yang dilakukan tidak dilakukan secara transparansi oleh KSM, sebab diduga terdapat permainan harga dibalikinya.
- j. Dari tahap dokumentasi dari empat kriteria foto yang harus ditampilkan terdapat beberapa kriteria yang tidak ditampilkan , yaitu foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan prasarana ( meskipun didalam laporan realisasi anggaran diketahui adanya peran serta perempuan di dalam pelaksanaannya), dan foto yang memperlihatkan pembayaran insentif secara langsung kepada masyarakat.
- k. Diketahui bahwa pemeriksaan realisasi kegiatan dan biaya ( RKB ) tidak sepenuhnya dibuat sesuai dengan kondisi terlaksana

dilapangan , dan menunjukkan target akhir dari pelaksanaan. Sebab diketahui pembuatan laporan yang hanya berdasarkan rekapitulasi bukti – bukti transaksi yang terjadi saja.

Dalam rangka menyempurnakan kegiatan Tridaya LKM Bakti Mandiri melalui PNPM mandiri berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional yang telah ditetapkan sebagaimana yang tertuang pada surat edaran menteri dalam negeri nomor 414.2/3717/PMD tahun 2008, penulis memberikan beberapa saran yang bisa bermanfaat, antara lain :

- a. Sebaiknya dilakukan analisis pinjaman berdasarkan *character, condition, capacity, capital dan collateral* sehingga dapat mencegah bahkan meminimalkan kemungkinan terjadinya kredit macet.
- b. Sebaiknya UPK melakukan pemeriksaan kelayakan KSM sebagai sasaran PNPM dan sebagai calon peminjam, sehingga sasaran PNPM pada umumnya dan LKM pada khususnya dapat tercapai.
- c. Sebaiknya UPK melakukan pembinaan kepada peminjam, dengan cara kunjungan ketempat usaha, maupun kerumah peminjam, sehingga memungkinkan terkontrolnya keberlangsungan kegiatan usaha yang dijalankannya maupun keberadaan sipeminjam, dengan begitu pinjaman kurang lancar, tidak lancar, bahkan kredit macet dapat diminimalkan.
- d. Sebaiknya dilakukan analisis terhadap usaha anggota sehingga menutup kemungkinan terjadinya manipulasi data oleh peminjam, dimana hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet.
- e. Sebaiknya dibuat pengukuran secara jelas terhadap tingkat pemahaman UPS mengenai prinsip pengelolaan kegiatan yang akan dijalankan. Sehingga adanya terjadinya kesesuaian kegiatan dengan target yang telah ditetapkan.
- f. Sebaiknya dilakukan analisis kelayakan KSM guna pencapaian target yang telah ditetapkan.

- g. Sebaiknya dilakukannya klarifikasi ke lapangan terhadap penerima manfaat kegiatan pendidikan, sehingga memungkinkan tercapainya sasaran kegiatan sosial, baik dari segi kriteria penerima maupun dari segi keberlanjutan kegiatan.
- h. Sebaiknya dilakukan pengumuman kepada masyarakat untuk rencana pelaksanaan kegiatan, sehingga adanya warga lain yang dapat menerima manfaat dari kegiatan tersebut.
- i. Sebaiknya dilakukan pengawasan dalam kegiatan pengadaan bahan, dengan tidak hanya menerima informasi secara lisan namun ikut terjun langsung melakukan survey kelapangan. Sehingga terciptanya transparansi oleh KSM.
- j. Sebaiknya disajikannya empat kriteria dokumentasi foto yang harus ditampilkan, yaitu foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan prasarana ( meskipun didalam laporan realisasi anggaran diketahui adanya peran serta perempuan di dalam pelaksanaannya), dan foto yang memperlihatkan pembayaran insentif secara langsung kepada masyarakat.
- k. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan kesesuaian realisasi kegiatan dan biaya ( RKB ) dengan kondisi yang terlaksana dilapangan dengan terjun langsung kelapangan.
- l. Penelitian ini menggunakan Petunjuk Teknis Operasional PNPM tahun 2008 sebagai parameter perbandingan terhadap kegiatan yang dijalankan. Hal ini dikarenakan minimnya informasi dan data yang diperoleh, jadi untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan Petunjuk Teknis Operasional yang terbaru, sehingga penelitian dan hasil yang diperoleh lebih *uptodate*.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim , 2007. *Panduan Umum PNPM Mandiri Perkotaan*. Departemen Kementerian Dalam Negeri

- [2] ————, 2008. *Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tridaya PNPM Mandiri Perkotaan*. Departemen Kementerian Dalam Negeri
- [3] Arens, Alvin dan Loebbecke. 2006. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Jakarta : Salemba Empat
- [4] Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- [5] Akmal. 2006. *Pemeriksaan Intern*. Edisi Pertama. Jakarta : Indeks
- [6] Hall, James . A, Singleton, Tommie. 2007. *Information Technology Auditing and Assurance*. Jakarta : Salemba Empat
- [7] Sudjana. 2001. *Metoda Statistika*. Bandung : Tarsito
- [8] Tunggal, Amin Widjaja. 2013. *Corporate Fraud & Internal Control*. Jakarta : Harvarindo
- [9] Mulyadi, 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi ketiga. Jakarta : Salemba Empat
- [10] ————2002. *Auditing*. Edisi keenam . Jakarta : Salemba Empat
- [11] Permata Dewi, Sarita. 2012. “ Pengaruh Pengendalian Internal Dan Gaya Kepimpinan Terhadap Kinerja Karyawan SPBU Yogyakarta : Studi Kasus Pada SPBU Anak Cabang Perusahaan RB. Group. Jurnal Nominal. Volume I No I.